



Munich Personal RePEc Archive

# **The Strategy of Islamic Economic Development in Perspective of M. Umer Chapra**

Arikha, Dahlia

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1 January 2022

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/112257/>  
MPRA Paper No. 112257, posted 07 Mar 2022 05:35 UTC

# **Strategi Pembangunan Ekonomi Islam M. Umer Chapra**

**Dahlia Arikha**

**Student of Sharia Economic Study Program**

**Master of IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

**[Dahliaarikha@gmail.com](mailto:Dahliaarikha@gmail.com)**

Abstract:

This research is a study with a literature method based on the author's search for Chapra's works on the Islamic Economics Development. In formulating economic development, Chapra first analyzed the thought of economic development from the west dominated by secular thought. As a result, Chapra found inconsistencies in secular economic development thinking which applied in the economic development system of the world's countries. Chapra believes that the inconsistencies of economic development cause destruction and bring the economy away from justice. Chapra's criticism led Chapra to the conclusion that Islam has great potential to fill consistency in socially equitable economic struggles.

Key words: Secular Economic Development, Islamic Economic Development, Justice

JEL code: A13, B00, C53, D63,E6

## **A. Biografi Singkat M. Umer Chapra**

M.Umer Chapra (88 tahun) lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Berkebangsaan Pakistan kemudian menetap di Saudi.<sup>1</sup> Abdul Karim yang merupakan ayah Chapra menanamkan religiusitas pada diri Chapra sejak dini. Chapra tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Chapra tumbuh dalam lingkungan keluarga berkecukupan yang memungkinkan Chapra mendapatkan pendidikan tinggi. Chapra menghabiskan masa kecil di Pakistan hingga berumur 15 tahun. Chapra kemudian pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya sampai meraih gelar Ph.D dari universitas Minnesota. Chapra menikah diusia

---

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.vii.

29 tahun dengan Khoirunnisa Jamal Mundi di tahun 1962. Chapra dan Khirunnisa diangugerahi empat anak, yaitu Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.<sup>2</sup>

Karir intelektual M.M.Umer Chapra diawali ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956 karir akademis Chapra berada pada tingkat tertinggi dengan meraih gelar doktoral di Minnesota Minepolis. Pembimbingnya Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra akan memiliki karir sebagai cendekiawan yang cemerlang.<sup>3</sup>

Menurut Profesor Smith, Chapra adalah murid terbaik yang pernah dikenalnya bukan hanya dikalangan mahasiswa namun juga seluruh fakultas.<sup>4</sup> M. Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam. Chapra menjadi penasihat pada *Islamic Research and Training Institute* dari *Islamic Development Bank* Jeddah. Pada tahun 1964, Chapra kembali ke Amerika dan mengajar di beberapa sekolah tinggi ternama. Diantaranya adalah *Harvard Law School*, *Universities of Wisconsin, United States*, 7 Universitas Autnoma, Madrid, Universitas Loughborough, U.K, *Oxford Center for Islamic Studies*, *London School of Economic*, Universitas Malaga, Spanyol, dan beberapa Universitas di berbagai negara lainnya<sup>5</sup>

Chapra berperan penting dalam perkembangan ekonomi Islam dengan Ide-ide cemerlang yang tertuang dalam karya-karyanya. Chapra mendapatkan penghargaan dari *Islamic Development Bank* dan dari *King Faisal International Award* atas kerja kerasnya dalam

---

<sup>2</sup> Diambil dari halaman persembahan dalam M. Umer Chapra, *Islam And Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*, (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1993).

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. X.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm ix

<sup>5</sup> Anas Zarqa, dalam M. Umer Chapra, *Muslims Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform*, (Jeddah, Saudi Arabia: King Abdul Aziz, University, 2008).

mengembangkan teori-teori keuangan ekonomi syariah. Kedua penghargaan ini diperoleh pada tahun 1989.<sup>6</sup> Berikut merupakan jejak digital dari situs resmi King Faisal Prize saat menggambarkan pentingnya kontribusi Chapra dalam perjalanan pembangunan ekonomi Islam saat ini.

*An accomplished scholar of Islamic economics, Chapra made seminal contributions to Islamic economics and finance over the past several decades. He published around 15 books and monographs and more than 90 articles and book reviews. One of his groundbreaking contributions is his book *Towards a Just Monetary System* (1985). Reviewing that book in the *Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies*, Professor R. Wilson of the University of Durham described it as “the most lucid presentation yet of the monetary theory of Islam.” Chapra had since written other books, including: *Islam and the Economic Challenge*, which was described by the prominent American economist, K. Boulding, as “a brilliant analysis of the virtues and the defects of capitalism, socialism and the welfare state, and an important contribution to the understanding of Islam by both Muslims and non-Muslims.” In 2002, he published *The Future of Economics: An Islamic Perspective* followed in 2005 by *Objectives of Islamic Economic Order: An Introduction in Economics and Islamic Financing* both of which have also been well received. In 2008, he published a book on *Islamic Civilization, the reasons for its deterioration and the need for reform*. Chapra’s books were translated into many languages and are taught in universities worldwide. He delivered numerous invited lectures and participated in hundreds of conferences worldwide.*<sup>7</sup>

Sebagai seorang sarjana ekonomi Islam yang berprestasi, Chapra membuat kontribusi cemerlang untuk ekonomi dan keuangan Islam selama beberapa dekade terakhir. Dia menerbitkan sekitar 15 buku dan monografi dan lebih dari 90 artikel dan resensi buku. Salah satu kontribusi terobosannya adalah bukunya *Towards a Just Monetary System* (1985). Meninjau buku itu di Buletin Masyarakat Inggris untuk Studi Timur Tengah, Profesor R. Wilson dari Universitas Durham menggambarkannya sebagai "presentasi paling jelas dari teori moneter Islam." Chapra sejak itu telah menulis buku-buku lain, termasuk: *Islam and the Economic Challenge*, yang digambarkan oleh ekonom Amerika terkemuka, K. Boulding, sebagai “analisis brilian tentang kebajikan dan cacat kapitalisme, sosialisme dan negara kesejahteraan, dan sebuah kontribusi penting bagi pemahaman Islam baik oleh Muslim maupun non-Muslim.” Pada tahun 2002, Chapra menerbitkan *The Future of Economics: An Islamic Perspective* diikuti pada tahun 2005 oleh *Objectives of Islamic Economic Order: An Introduction in Economics and Islamic Financing* yang keduanya juga telah diterima dengan baik. Pada tahun 2008, Chapra menerbitkan sebuah buku tentang Peradaban Islam, alasan kemundurannya dan perlunya reformasi. Buku-buku Chapra diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan diajarkan di universitas-universitas di seluruh dunia. Chapra menyampaikan banyak diskusi

---

<sup>6</sup> <https://kingfaisalprize.org/dr-mohammad-o-shabra/> diakses 02 Februari 2021

<sup>7</sup> *Ibid.*

dan berpartisipasi dalam ratusan konferensi di seluruh dunia

Dengan demikian Umer Chapra adalah pakar yang kompeten, yang dapat berbicara secara lebih fundamental, mengenai persoalan-persoalan sistem perekonomian saat ini. Umer Chapra juga bertindak sebagai komisi teknis dalam *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Chapra juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari IOP (*Islamic Overseas of Pakistanis*) untuk jasanya terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di Islamabad.<sup>8</sup>

## **B. Telaah Teori Pembangunan Ekonomi Masa ke Masa**

Strategi-strategi yang diajukan oleh ekonomi pembangunan didasarkan pada pandangan dunia Barat. Strategi yang diikuti pada satu periode tertentu bergantung pada arus utama ekonomi yang sedang naik daun pada saat itu. Dengan demikian, ekonomi pembangunan telah menyaksikan perubahan maju dan mundur dari strategi Keynesian dan sosialis sampai pada strategi neoklasik.<sup>9</sup>

Terdapat tiga fase yang telah dilalui ekonomi pembangunan. **Fase pertama** adalah ekonomi pembangunan kuno yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja liberal kapitalisme *laissez-faire*. Ekonomi pertumbuhan ini tetap menjadi perhatian utama bagi para ekonom klasik kurang lebih satu abad setelah publikasi *The Wealth of Nation* karya Adam Smith.

---

<sup>8</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2005), hlm. 297-298. Lihat juga M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance*, Edisi terjemahan: *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 221.

<sup>9</sup> Chapra, *Islam and Economic Development*, hlm 147.

**Fase kedua** dimulai setelah Perang Dunia Kedua, ketika sejumlah Negara-negara berkembang merdeka dan sebuah analisis mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembangunan mulai mendapatkan perhatian.<sup>10</sup> Namun, kapitalisme *lassiez-faire* telah kehilangan peran pada saat itu akibat dari peristiwa “*Great Depression*” dan masalah-masalah rekonstruksi pasca perang dunia, sementara ekonomi Keynesian dan sosialisme menjadi populer.

Ekonomi Keynesian dan sosialisme memperoleh momentum di Barat pada saat itu sebagai akibat dari depresi besar dan persoalan-persoalan rekonstruksi pascaperang, maka ekonomi pembangunan juga bergeser dari baris neoklasik dan menyerukan ketergantungan yang lebih kecil pada pasar dan peran yang lebih besar dari pemerintah dalam ekonomi. Namun, ketika pegangan kepada strategi sosialis dan Keynesian mulai melemah, pada awal dasawarsa 1970-an dan ekonomi neoklasik mulai bangkit kembali, ekonomi pembangunan mulai mengalami krisis.<sup>11</sup>

Sementara, mayoritas pendukung ekonomi pembangunan masih percaya pada kegunaannya, tetapi banyak kalangan yang meragukan legitimasi disiplin ini.<sup>12</sup> Perdebatan akhirnya menimbulkan polarisasi antara mereka yang tidak mendukung ketergantungan semata-mata pada pasar dan harga-harga, dan mereka yang percaya bahwa liberalisasi pasar dengan peran pemerintah yang dikurangi dalam ekonomi adalah sangat diperlukan untuk memecahkan problem-problem Negara berkembang.<sup>13</sup> Pada tahap ini, ekonomi pembangunan masuk ke **fase ketiga**.

---

<sup>10</sup> E.E Hagen, *On the Theory of Social Change* (1962), hlm. 36. Dikutip Chapra, *Islam and economic Challenge*, hlm. 148.

<sup>11</sup> D. Colman dan F. Nixon, *Economics of Change in Less Developed Countries* (1986), hlm. Vi. Dikutip Chapra dalam *Islam and Economic Challenge*, hlm. 147.

<sup>12</sup> Chapra, *Islam and Economic Challenge*, hlm. 148.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Menurut Chapra pandangan yang dominan sekarang lebih bersifat anti-*dirigiste* dan propasar bebas, yang mencerminkan kebangkitan kembali liberalisme dan ekonomi neoklasik di Barat. Konsekuensinya, banyak persoalan yang kini dialami oleh Negara-negara berkembang yang dipersalahkan pada kebijakan-kebijakan *dirigiste* yang diikutinya selama tiga dasawarsa.<sup>14</sup>

Dukungan yang terus berubah terhadap ekonomi pembangunan, dari sistem pasar pada peran pemerintah dan kembali lagi pada sistem pasar telah menjauhkan ekonomi pembangunan dari arah yang tegas. Hal ini menyebabkan adanya analisis-analisis yang bertentangan. Resep-resep kebijakan menimbulkan inskonsistensi dan ketidakpastian dalam program-program pembangunan perekonomiannya. Pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Negara-negara dunia ketiga tentu semakin sulit. Negara dunia ketiga tidak saja harus membangun perekonomiannya dengan cara yang mengantarkan pada efisiensi yang lebih besar dan pemerataan penggunaan sumber-sumber daya langka, tetapi juga harus menghapuskan ketidakseimbangan yang disebabkan oleh resep pembangunan yang salah.<sup>15</sup>

Apakah kebijakan-kebijakan besar yang sedang direkomendasikan berdasarkan ekonomi neoklasik akan membantu mewujudkan pemerataan dengan efisien dan stabilisasi? Inilah pertanyaan mendasar bagi Chapra yang muaranya akan mengantarkan kita untuk mulai memikirkan dampak pandangan dunia Barat pada ekonomi pembangunan dan persoalan-persoalan yang ditimbulkannya di Negara-negara yang sedang membangun.

Ekonomi neoklasik, Keynesian dan sosialis adalah produk dari dunia pencerahan, tentu mereka adalah sekuler dalam pendekatannya pada analisis problem manusia dan realisasi kesejahteraan umat. Mereka terlalu menekankan konsumsi dan kepemilikan materi sebagai

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

sumber kebahagiaan manusia dan secara implisit tidak komitmen terhadap persaudaraan manusia dan keadilan sosioekonomi.<sup>16</sup>

Sekularisme adalah pandangan dunia yang dominan di dunia Barat. Dominasi ekonomi, intelektual, dan politik Barat atas negara-negara lain memberi pengaruh yang signifikan terhadap aktifitas perekonomian dunia ketiga. Konsep sekularisme membentuk konsep “manusia ekonomi” dalam kehidupan ekonomi modern.

*.....the concept of 'economic man', which has served as the kingpin of modern economics. Self-interest was the only well-spring of his action. Consumption was the highest purpose of his life, the supreme source of happiness, and the ultimate justification for all his effort. Maximizing earnings and want satisfaction became supreme virtues. Everything done by the individual towards this end was justified, He should, therefore, be left free to serve his self-interest. Any talk of the 'rights of man' was plain nonsense.<sup>17</sup>*

Chapra dalam *Islam and Economic Development* mengu klaim Russel diatas.<sup>18</sup> Konsep manusia ekonomi yang terbentuk dalam individu-individu modern berpijak pada nilai utilitarianisme. Baik-buruk atau benar salah dalam masyarakat modern ditentukan pada sensasi kesenangan atau kesakitan sebagai akibat yang ditimbulkan ketika melakukan suatu aksi. Sehingga, kepentingan pribadi merupakan sumber gerakannya. Konsumsi adalah tujuan tertinggi dari segala usahanya. Memaksimalkan penghasilan dan memenuhi keinginan telah menjadi kebaikan tertinggi. Muaranya, Logika yang terbentuk adalah membenarkan segala usaha manusia dalam mencapai sasaran kesenangan. Karenanya, manusia dibiarkan bebas untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

*Their strictly this-worldly perspective does not provide a rationale for anything other than materialism and social Darwinism. Within this framework there is no motivation to serve social interest except where it is automatically served as an indirect result of serving self-interest.<sup>19</sup>*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>17</sup> Bertrand Russel, *A history of Western Philosophy* (New York: Simon and Schuster. 1945), hlm. 775

<sup>18</sup> Chapra, *Islam and Economic Development*, hlm 14.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 11

Sempitnya pandangan sekuler menyebabkan tidak adanya suatu falsafah selain materialism dan darwinisme sosial. Jelaslah kerangka kerja ini tidak memiliki motivasi untuk melayani kepentingan sosial kecuali bila hal itu secara otomatis melayani kepentingan diri sendiri.

### **C. Strategi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Menurut M. Umer Chapra**

Setidaknya Chapra merangkum 3 (tiga) elemen penting dalam mewujudkan strategi pembangunan: 1) Mekanisme filter yang secara sosial disepakati agar tercipta efisiensi sumber daya; 2) Mekanisme yang dapat memberikan motivasi yang mendorong masing-masing individu untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya dan masyarakatnya; 3) restrukturisasi sosioekonomi untuk membantu mentransfer sumber daya-sumber daya terbatas dari satu penggunaan ke penggunaan yang lain sehingga pemerataan dan efisiensi optimum dapat diwujudkan. Strategi dengan tiga elemen pokok harus pula didasari dimensi moral dalam suatu sistem ekonomi.

Berdasarkan penjabaran Chapra mengenai pembangunan ekonomi islam, sistem ekonomi yang ada saat ini belum mampu selaras pun terbukti gagal dalam menciptakan filter, sehingga permasalahan efisiensi dan pemerataan jauh dari kata adil. Klaim Chapra ini dibuktikan dengan hasil penelitian dan analisis serius terhadap ketiga sistem ekonomi tersebut masih mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Umer Chapra tidak memusnahkan semua teori-teori yang pernah dibangun oleh para ekonom konvensional sebelumnya, namun Umer Chapra melalui pendekatannya memadukan antara teori ekonomi konvensional dengan teori ekonomi Islam, sehingga lahir-lah yang disebut dengan mazhab mainstream.<sup>20</sup>

Strategi Islam memiliki potensi besar untuk berhasil karena empat elemen yang saling berhubungan dan sangat efektif, sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> lih. awal pembahasan bab tiga, Chapra digolongkan menjadi madzhab mainstream karena pemikirannya yang mengasimilasi pemikiran konvensional dan islam sesuai kaidah maqashid syariah.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 55.

## **1. Penyaringan yang Merata atas klaim yang Berlebihan**

Problem pertama yang dihadapi setiap masyarakat dalam mengaktualisasikan sasaran-sasaran egalitariannya adalah bagaimana menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber daya dalam suatu cara tertentu di mana hanya klaim-klaim yang lolos tes efisiensi dan pemerataan saja yang boleh diakui. Mekanisme harga memang bisa bertindak sebagai filter, namun hal itu tidak beroperasi dalam pola yang merata. Karena itu, Islam melengkapinya dengan menambah satu filter lagi yang akan menjamin pemerataan.

Filter moral ini akan menyerang langsung jantung permasalahan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas, yaitu kesadaran individu yang paling dalam, dengan mengubah skala preferensi mereka mengikuti prioritas-prioritas sosial dan membuat klaim-klaim mereka terhadap sumber daya suatu fungsi bagi kesejahteraan manusia. Hal itu menghilangkan atau paling tidak meminimalkan, klaim-klaim yang tidak esensial dan tidak adil dilihat dari sudut pencapaian sasaran-sasaran social.<sup>22</sup>

Dengan demikian, filter moral memoderatkan dan memanusiakan pengaruh yang diciptakan oleh kekayaan, kekuasaan dan berbagai lembaga finansial dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Dengan demikian filter harga akan melakukan tugasnya secara lebih efektif dalam mewujudkan alokasi sumber daya efisien dan adil.

## **2. Motivasi**

Masalah kedua yang dihadapi oleh setiap masyarakat adalah bagaimana memotivasi individu untuk melayani kepentingan sosial seiring dengan filter moral meskipun ketika berbuat demikian merugikan kepentingan sendiri.<sup>23</sup> Islam tidak melarang individu memenuhi kepentingannya sendiri, tetapi dengan memberikan

---

<sup>22</sup> Chapra, *Islam and Economic Development*, hlm. 80.

<sup>23</sup> Ibid.

kepentingan diri sendiri (*self-interest*) dimensi spiritual dan berjangka panjang yang menembus wilayah khidupan ini. Apabila hal ini diterima, yaitu apabila masalah individu dapat dipenuhi dengan nafsu keakuannya sekalipun, maka masalahnya diakhirat tidak akan dapat dipenuhi kecuali dengan berperilaku yang tidak merugikan kepentingan orang lain karena sama- sama berkedudukan sebagai *khalifah* Allah.

Di satu pihak, Islam mengakui kontribusi yang diberikan oleh kepentingan pribadi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan terhadap inisiatif individu, dorongan, efisiensi dan kewirausahaan. Di pihak lain kejahatan dari ketamakan, nafsu yang tidak mengindahkan moral dan ketidakpedulian terhadap hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan orang lain yang selalu di gambar-gemborkan oleh pandangan sekularis dan perspektif pitalisme maupun sosialisme dapat diatasi dengan cara memperkenalkan penekanan yang tidak pernah berakhir pada keimanan kepada Allah, nilai-nilai moral, pertanggungjawaban dihadapan Allah, persaudaraan manusia dan keadilan sosioekonomi.

Gagasan mengenai pertanggungjawaban didepan Allah dapat berfungsi sebagai kekuatan yang memberi motivasi kuat bagi individu untuk memenuhi nilai-nilai moral dan mencegah mereka untuk mengikuti nafsu melebihi batas-batas norma sosial dan kesejahteraan.<sup>24</sup>

### **3. Restrukturisasi Sosioekonomi**

Nilai-nilai moral perlu diperkuat dengan melakukan restrukturisasi sosioekonomi dalam suatu cara memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka hanya dalam batas-batas kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Restrukturisasi itu harus bertujuan:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 82

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 83.

- a. Mentransformasi faktor manusia dalam pembangunan untuk menjadikannya mampu berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang efisien dan merata.
- b. Mereduksi konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi yang kini sedang berjalan sebanyak mungkin untuk melengkapi peran transformasi moral dalam meminimalkan pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam alokasi dan distribusi sumber daya.
- c. Mengeliminasi atau meminimalkan segala bentuk konsumsi “berlebihan” dan “tidak perlu” baik pada tingkat swasta maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan tabungan dan memperbesar volume sumber daya yang tersedia untuk investasi dan pemenuhan kebutuhan.
- d. Melakukan reformasi sistem keuangan sedemikian rupa sehingga mampu berperan secara komplementer dalam restrukturisasi.

#### **4. Peran Negara**

Dalam sistem perekonomian apapun sering terjadi pertentangan antara peran negara dan pasar. Misalnya para penganut paham liberal berpendapat bahwa “pemerintah yang baik adalah yang semakin kecil campur tangannya”. Paham liberal mengagungkan kebebasan pasar dan menginginkan peran negara seminimal mungkin, disisi lain paham komunis menginginkan semua berada di bawah kendali negara termasuk hak milik.

Bagaimanapun, sebuah kepercayaan tidak akan bisa membantu menjerahatkan manusia. Suatu hal yang tidak realistis jika beranggapan bahwa semua orang akan menjadi manusia yang sepenuhnya sadar bermoral ditengah-tengah masyarakat, hanya karena percaya akan Tuhan dan pertanggung jawaban di hari akhir.

Selain itu, bahkan jika manusia sadar akan moral, mungkin mereka tidak menyadari prioritas sosial dalam penggunaan sumber daya.<sup>26</sup>

Peran pemerintah yang dimaksudkan disini tidaklah sama dengan apa yang diterapkan di Tiongkok dan Uni Soviet yang totaliter. Hal ini lebih merupakan peran pelengkap yang akan dimainkan oleh pemerintah melalui internalisasi nilai-nilai Islam di masyarakat, penciptaan sosial lingkungan ekonomi yang sehat, dan pengembangan lembaga-lembaga yang memungkinkan tepat dan tidak melalui kontrol yang berlebihan, pelanggaran yang tidak perlu terhadap kebebasan individu dan penghapusan hak milik.<sup>27</sup>

Peran-peran pemerintah yang dimaksud adalah:

- Membangun kualitas sumber daya manusia
- Mengurangi pemusatan kekayaan
- Restrukturisasi ekonomi dan keuangan

## **5. Keuangan Publik**

### **a. Zakat**

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim sebagaimana shalat, puasa dan haji, yang harus di keluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak bisa dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri. Namun demikian, pemerintah Islam harus tetap menjaga dan memainkan peranan penting dalam memberikan kepastian dijalankannya nilai-nilai Islam. Agar Zakat memainkan peranannya secara berarti, sejumlah ilmuan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 36.

<sup>27</sup> Ibid.

menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang kurang mampu mendapatkan penghasilan yang cukup.

b. Pajak

Pemberlakuan pajak harus adil dan selaras dengan semangat Islam. sistem pajak yang adil harus memenuhi tiga kriteria, yaitu;

1. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan maqashid.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang memikulnya.
3. Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.

c. Prinsip-prinsip Pengeluaran

Ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu;

1. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah kemaslahatan masyarakat.
2. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan dari pada penyediaan rasa tentram.
3. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahuluka dari pada kepentingan minoritas yang lebih sedikit.
4. Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik.
5. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
6. Sesuatu diamana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak terpenuhi, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

#### **D. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra**

Pendekatan Islam yang berdimensi empat (mekanisme pasar dengan filter moral, motivasi individu, restrukturisasi sosioekonomi dan peran positif pemerintah) harus dapat membuktikan lebih efektif dalam menjamin kesejahteraan semua anggota masyarakat daripada pendekatan kapitalisme atau sosialis yang berdimensi tunggal dan hanya mengandalkan kolektivisasi dan perencanaan pusat. Saat melakukan hal-hal di atas, perlu adanya jaminan bahwa tindakan jaminan yang akan diadopsi harus memenuhi dua kriteria.<sup>28</sup>

Kriteria pertama, tindakan kebijakan itu harus mampu melakukan kontribusi terhadap realisasi tujuan-tujuan syari'at (*maqosid*) tanpa harus berbenturan dengan syari'at. Kriteria kedua adalah tidak boleh dipenuhi lewat kersangkas kerja optimalitas Pareto. Suatu strategi yang memandang bahwa meningkatkan sumber daya untuk tujuan-tujuan spesifikn tanpa mengurangi ketersediaannya untuk tujuan-tujuan yang lain hanya akan mengarah kepada kegagalan dan ketidakseimbangan.

Lima tindakan kebijakan yang diajukan bagi pembangunan yang disertai dengan keadilan dan stabilitas, adalah:

a. Memberikan Kenyamanan kepada Faktor Manusia

Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kepentingan dirinya tidak di lindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan.

b. Mengurangi Konsentrasi Kepemilikan

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 84.

Hambatan yang paling serius bagi pembangunan berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi di negara-negara muslim, seperti halnya juga diseluruh perekonomian yang merugikan pasar. Bila situasi ini tidak dirubah melalui pemberlakuan tindakan-tindakan radikal tertentu yang di perbolehkan oleh syari'at, maka tidaklah mungkin untuk membuat suatu kemajuan yang berarti dalam mewujudkan tujaun-tujuan egalitarian Islam.<sup>29</sup> Mengurangi konsentrasi kepemilikan mempunyai lima faktor pendukung, sebagai berikut:

1. Reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan
2. Pengembangan industry mikro dan kecil
3. Kepemilikan yang lebih luas dan control perusahaan
4. Pengaktifan zakat dan sistem warisan Islam
5. Restrukturisasi sistem keuangan

c. Restrukturisasi Ekonomi

Relokasi sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa adanya restrukturisasi ekonomi. Beberapa faktor restrukturisasi:<sup>30</sup>

1. Mengubah preferensi konsumen
2. Reformasi keuangan pemerintah
3. Restrukturisasin iklim investasi
4. Produksi yang didasarkan pada kebutuhan
5. Pendekatan baru bagi pengangguran

d. Restrukturisasi Finansial

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 97.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 110.

Tujuan utama mencapai pengembangan di pedesaan dan perkotaan dalam rangka memecahkan problem utama ekonomi, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan akan tetap menjadi mimpi yang indah kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaan. Problem utama pada pengembangan ekonomi adalah mereka tidak mempunyai akses kepada sumber daya finansial yang cukup untuk berwirausaha dan upah pekerjaan baik karena tidak secara optimal menggunakan ketrampilan mereka atau karena upah yang diterima tidak mencukupi kebutuhannya apalagi menabung untuk investasi.<sup>31</sup>

Penggunaan sistem finansial yang diilhami oleh ajaran Islam dapat lebih kondusif dalam mengontrol kemampuan dan membawanya untuk dapat menjadikan industry kecil dan mikro menghasilkan *output*, menciptakan lapangan kerja dan distribusi pendapatan.

e. Perencanaan Kebijakan Strategi

Tidaklah mungkin bagi negara-negara muslim untuk mewujudkan tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqasid*) dalam keterbatasan sumber daya kecuali jika mereka mengambil hajat-hajat dan sumber daya tersebut secara benar. Hal ini dapat dilakukan secara lebih efektif jika suatu perencanaan strategi jangka panjang dipersiapkan. Perencanaan demikian akan dapat membuat negara mampu mengambil suatu perhitungan yang realistis tentang segala sumber daya manusia dan fisik yang tersedia, serta untuk membangun, dalam kerangka ini, sekumpulan prioritas yang ditentukan secara matang. Hal ini akan membantu dalam memberikan arahan yang jelas bagi kebijakan-kebijakan pemerintah dan anggaran belanja, serta mendorong inisiatif tindakan-tindakan yang efektif untuk menggerakkan perubahan-perubahan structural dan institusional supaya

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 142.

pemerintah maupun swasta dapat mengembangkan kontribusinya secara optimal.<sup>32</sup>

Gambar 3.1 Pemikiran M. Umer Chapra

Indikator Pembangunan	Tercapainya masalah (terlindunginya kebebasan berkeyakinan, perlindungan kehidupan, perlindungan pikiran, perlindungan harta, perlindungan keturunan)
Objek dan Subjek Pembangunan	Manusia, Lingkungan dan Spiritual
Peran Pemerintah dan Masyarakat	Pemerintah sebagai perencana dan pembuat regulasi dan masyarakat sebagai partisipator aktif dalam pembangunan
Keuangan	Revitalisasi keuangan publik (ZISWAF), reformasi keuangan publik dengan mengatur prioritas pengeluaran, pajak yang adil dan efisien, membatasi defisit.
Pasar	Liberalisasi pada sektor tertentu untuk kepentingan masyarakat

## E. Kesimpulan

Visi islam dalam Pembangunan Ekonomi adalah membuat komitmen yang kuat terhadap persaudaraan dan keadilan yang selaras dengan terciptanya kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia. Dan kesejahteraan sendiri, bukanlah kepuasan terhadap segala sesuatu yang bersifat materi sebagaimana yang menjadi fokus dari sistem ekonomi konvensional. Kesejahteraan dapat terjadi hanya jika terdapat keseimbangan pemenuhan baik materi maupun rohani dari personalitas manusia. Menurut penulis pemikiran Chapra lebih pada upaya penyegaran pemikiran, respon, dan tawaran solusi atas masalah-masalah ekonomi pada

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 147.

umumnya dan pembangunan khususnya yang dihadapi umat Islam. Strategi Islam yang ditawarkan Chapra adalah dengan filter moral, motivasi, rekonstruksi sosio ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dada, Dr. Ebrahim. *Reformasi ekonomi (Sebuah Solusi Perspektif Islam)*. Terj. Ikhwan Abidin. Solo: PT. Aqwam Media Profetika. 2018.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Risalah Gusti. 1999.
- \_\_\_\_\_. *Muslims Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform*. Jeddah, Saudi Arabia: King Abdul Aziz, University. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Terj: Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- \_\_\_\_\_. *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqāsid Al-Sharī'ah*, (Jeddah: Research Adviser Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank). 2008.
- \_\_\_\_\_. *Islam And Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. (Islamabad: International Institute of Islamic Thought). 1993.
- \_\_\_\_\_. *Islam and the Economic Challenge*. London: The Islamic Foundation. 1995.
- Russel, Bertrand. *A history of Western Philosophy*. New York: Simon and Schuster. 1945.
- Prof. Al-Seddiq M. Al-Darir: *Dr. M. Umer Chapra*.
- <https://kingfaisalprize.org/dr-mohammad-o-shabra/>. Diakses 02 Februari 2021.